



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KAB. BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

Jl.Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna KodePos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun 2023 selesai disusun sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan Visi, Misi, dan Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja Utama yang telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Bupati Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial kabupaten Bengkulu Selatan disusun berdasarkan pada instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan revidi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Komitmen dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari indikator yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Sosial memperlihatkan hasil yang sangat baik.

Namun demikian, masih dirasa perlu dilakukan perbaikan guna penyempurnaan di masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun 2023 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

MANNA, Januari 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja tahun awal perencanaan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good government).

Seiring dengan upaya merealisasikan good government, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang secara sistematis telah tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Dinas Sosial berada di misi 1, yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing, dengan tujuan perangkat daerah: Meningkatnya kemandirian PPKS dan PSKS, yang indikatornya: Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial, Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat, sehingga ditetapkanlah IKU Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan : Pencapaian Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial.

Pembangunan sosial secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu, terukur keberhasilannya dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap pelaksanaan program sosial dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan dievaluasi capaian kinerjanya sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Pembangunan sosial pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat
2. Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan retorasi sosial
3. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial, kemandirian PPKS, keberfungsian sosial

4. Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitas sosial, kemandirian PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial keberfungsian sosial
5. Meningkatnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Meningkatnya penanganan orang/anak terlantar
7. Meningkatnya Penanganan korban bencana alam/sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian NO 121 Telp. (0739) 2360642 Manna KodePos.38513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-

Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun

2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kinerja sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab bertugas memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah penyusunan laporan kinerja.
 - b. Ketua Tim bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengoordinasikan, dan melaksanakan tugas dengan anggota tim, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab.
 - c. Sekretaris Tim bertugas untuk melaksanakan tugas administrasi, membantu menyiapkan kebutuhan tim, menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim.
 - d. Koordinator Kelompok Kerja bertugas mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, referensi dan menyusun narasi laporan kinerja sesuai dengan bidangnya, serta melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu perkembangan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab melalui Ketua Tim.
 - e. Anggota bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan

rencana kerja dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kelompok Kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim memiliki hak dan kewenangan meminta data, informasi dan/atau referensi yang dibutuhkan ke unit kerja lain dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 11 Desember 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan



EFREDDY GUNAWAN, S.STP, M.Si

Pembina/IVa

NIP. 19820221 200212 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	JUNAIDI, S.Sos	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3	DIANTI EKASARI, SE	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4	FITRI GINANTA, S.Si	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Bidang I
5	PUJI SRI HANDAYANI, AKS	Kabid Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang II
6	TITIEN NOVRIYANTI, SE	Kabid Pemberdayaan Sosial	Koordinator Bidang III
7	SYAHRIAR, S.Sos	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Bidang IV
8	IRAWAN FANSURI, SE	Kepala UPTD LBK	Koordinator Bidang V
9	PATMONO SUGIRI, A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota
10	HERU SAPUTRA, S.Pd	PHL	Anggota

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan

EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si
NIP.19820224-200212 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Penyusunan LKj 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj 3

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah 5

 A. SOTK..... 5

 B. Isu Strategis Perangkat Daerah..... 12

 C. Keadaan Pegawai 13

 D. Keadaan Sarana dan Prasarana 17

 E. Keuangan 18

1.5 Sistematika LKIP 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 23

2.1 Visi dan Misi..... 23

 A. Visi dan Misi Kepala Daerah 23

 B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 27

 C. Strategi dan Arah Kebijakan..... 28

2.2 Perjanjian Kinerja 31

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah..... 34

 A. Target Belanja 34

 B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis..... 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 40

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 40

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 43

3.3 Realisasi Anggaran 61

3.4 Inovasi Perangkat Daerah..... 66

BAB IV PENUTUP 69

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan 11

Gambar 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Struktural Eselonoring..... 13

Gambar 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan 14

Gambar 1.4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan..... 15

Gambar 1.5 Tenaga Pendamping dan Pekerja Sosial 16

Gambar 3.1 Respon kasus an. Sulaimi desa jeranglah tinggi oleh Bidang Resos 51

Gambar 3.2 Respon kasus disabilitas mental oleh Bidang Resos 51

Gambar 3.3 Pendampingan petugas dinsos bengkulu dalam melaksanakan home visit ... 51

Gambar 3.4 Dinsos Diversi Bersama Polres Bengkulu Selatan 51

Gambar 3.5 Penyaluran Bantuan Sembako 52

Gambar 3.6 Penyaluran Bantuan Sembako An. Jelman 52

Gambar 3.7 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIKS-NG..... 52

Gambar 3.8 Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIKS-NG..... 52

Gambar 3.9 Musyawarah Verifikasi Dan Validasi Data Bantuan Sosial 52

Gambar 3.10 Monitoring Dan Evaluasi Usulan Rumah Sejahtera Terpadu 52

Gambar 3.11 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial 53

Gambar 3.12 Pemberian bantuan alam untuk korban rumah tertimpah pohon 53

Gambar 3.13 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial 53

Gambar 3.14 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial kebakaran rumah 53

Gambar 3.15 Rakor Fasilitator Dan Supervisor..... 53

Gambar 3.16 Bimtek Puskesmas Desa/Kel 53

Gambar 3.17 Rakor TKSK..... 54

Gambar 3.18 Pendampingan Akreditasi Lks Oleh BBPPKS Padang 54

Gambar 3.19 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan “Semaku” 54

Gambar 3.20 Ziarah Nasional Peringatan Hut RI Ke 78 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Struktural Eselonoring..... 13

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan 14

Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan..... 15

Tabel 1.4 Tenaga Pendamping dan Pekerja Sosial..... 16

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana..... 17

Tabel 1.6 Keuangan Dinas Sosial 18

Tabel 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah..... 26

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan..... 30

Tabel 2.3 Target Belanja 34

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran 39

Tabel 3. 1 Pencapaian IKU Dinas Sosial..... 41

Tabel 3.2 Capaian SPM..... 42

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 43

Tabel 3.4 Analisis SWOT Untuk ASP 56

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan..... 58

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran 60

Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Program/Kegiatan..... 60

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan..... 62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Merupakan OPD Teknis yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas sosial dalam melaksanakan tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan teknis bidang sosial.
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas – tugas bidang sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten

Bengkulu Selatan Tahun 2023, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan- tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. Laporan Kinerja (LKj) adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang lalu. Analisis atas pembandingan

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (performance gap) yang perlu diperbaiki oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dimasa datang. Adapun maksud dan tujuan laporan adalah :

A. Maksud Laporan :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi kinerja yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Tujuan Laporan :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Bupati Bengkulu Selatan
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun stuktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang Sosial
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Sosial Bengkulu Selatan memiliki Susunan Organisasi yang terdiri atas:

- Kepala Dinas.
- Sekretariat, terdiri atas:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - Bidang Pemberdayaan Sosial.
 - Bidang Penanganan Fakir Miskin.

1. Sekretariat

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat meliputi:

- Kelompok Subtansi Keuangan;
- Kelompok Subtansi Perencanaan.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana

alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;

- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (3 Jabatan) meliputi:

- Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- Kelompok Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- Kelompok Substansi Jaminan Sosial Keluarga.

3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi Sosial;
- penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial;
- penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang;
- penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang;

- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengelolaan dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial; dan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial (3 Jabatan) meliputi:

- Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial, Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pemberdayaan Sosial;
- penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial;
- penyusunan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan

kelembagaan masyarakat;

- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil serta kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pemberdayaan sosial dengan instansi terkait;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Pemberdayaan Sosial (3 Jabatan) meliputi:

- Kelompok Substansi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil;
- Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat; dan
- Kelompok Substansi Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
- pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin;

- penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin;
- penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin;
- pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan antar daerah;
- pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dalam penanganan fakir miskin;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Penanganan Fakir Miskin (3 Jabatan) meliputi:

- Kelompok Substansi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- Kelompok Substansi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
- Kelompok Substansi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, Serta Penataan Lingkungan Sosial.

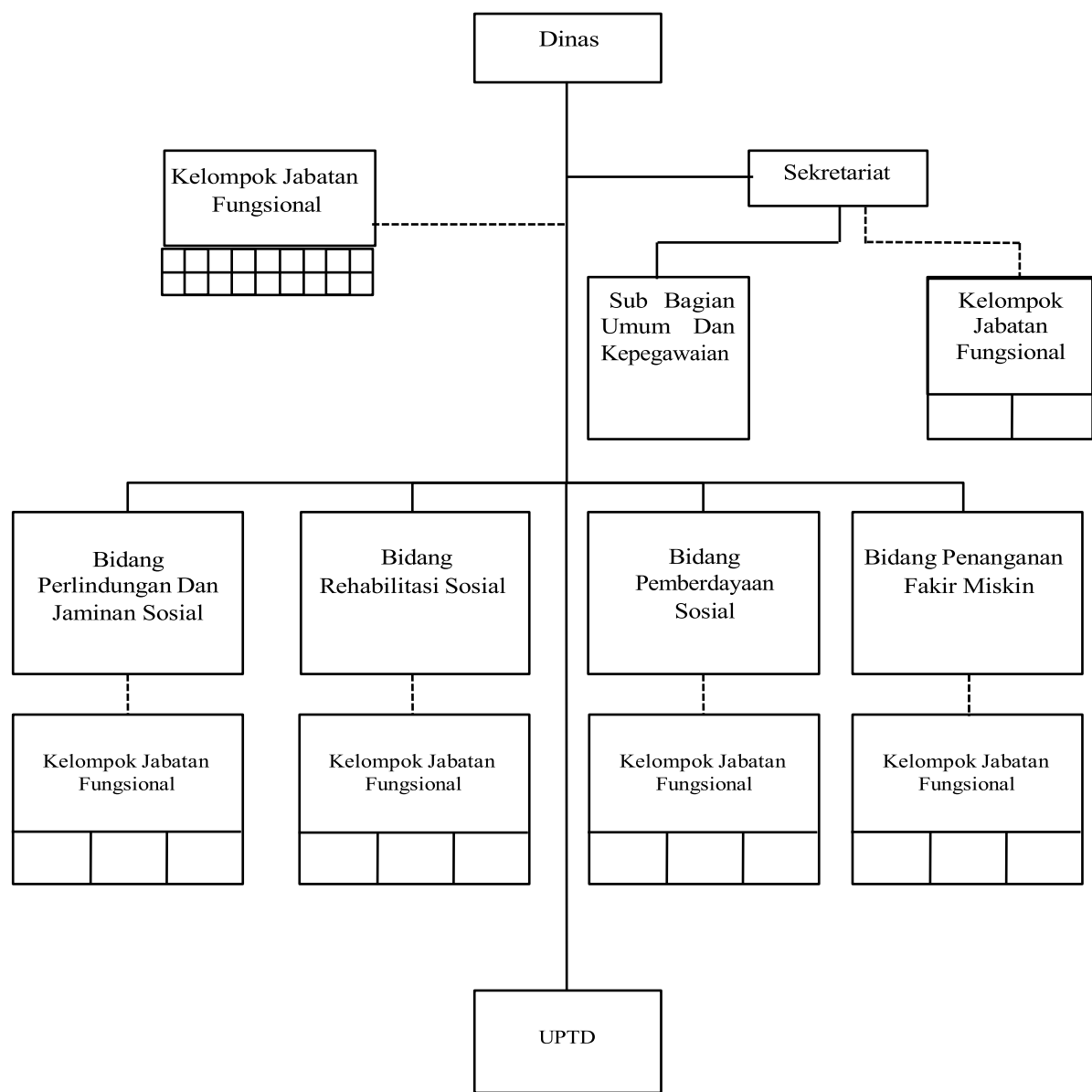
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Sosial, dapat dibentuk UPT pada Dinas Sosial sesuai dengan kebutuhan;
- Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan



B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu selatan memiliki permasalahan dan isu strategis untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya di uraikan untuk masing-masing bidang sebagai pelaksana urusan pelayanan dasar tersebut termasuk juga sekretariat sebagai unsur Service Center adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Belum optimalnya penerapan SOP sesuai dengan sosial yang berlaku
 - b. Belum memadainya prasarana dan sarana aparatur pemerintah
 - c. Belum optimalnya kapasitas SDM bidang Sosial
 - d. Belum optimalnya kualitas pelaporan dan keuangan
2. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabsosial PPKS
 - b. Belum optimalnya pembinaan disabilitas dan korban trauma
3. Bidang Pemberdayaan
 - a. Belum update dan valid nya PSKS
 - b. Belum optimalnya dan kuantitas pemberdayaan PSKS
 - c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - d. Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetia kawan sosial di semua sosial masyarakat.
 - e. Belum optimalnya sarana dan prasarana SLRT.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pencegahan dini dan penanggulangan bencana (alam dan sosial)
 - b. Belum terpenuhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Belum validnya data kemiskinan ,(Data JKN/KIS,KKS DLL)
 - b. Belum memadainya sarana untuk validasi Data

Akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai intansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang sosial merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada di Bengkulu Selatan yaitu; kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, atau korban tindak kekerasan yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Dari uraian permasalahan yang dihadapi Dinas

Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut diatas maka rumusan isu isu strategis urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam Renstra Dinas sosial “ masih banyaknya jumlah fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang belum mendapatkan pelayanan sosial yang berkeadilan”.

C. Keadaan Pegawai

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2023, Bila dirunut per jenjang berdasarkan strukutur eselonoring, pendidikan, pangkat dan golongan.

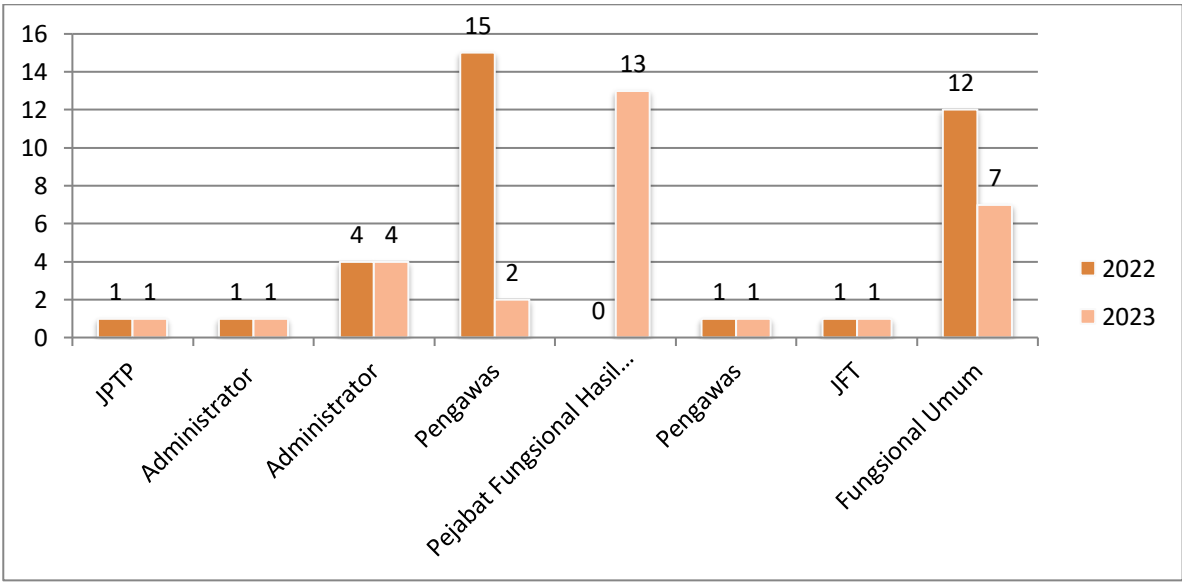
📊 Berdasarkan Struktural Eselonoring

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Struktural Eselonoring

No	Klasifikasi	Eselon	Jumlah (orang)	
			2022	2023
1	JPTP	Eselon II/b	1	1
2	Administrator	Eselon III/a	1	1
3	Administrator	Eselon III/b	4	4
4	Pengawas	Eselon IV/a	15	2
5	Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	Eselon IV/a	0	13
6	Pengawas	Eselon IV/b	1	1
7	JFT	-	1	1
8	Fungsional Umum	-	12	7
Jumlah			35	30
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan				

- Diagram Struktural Eselonoring

Gambar 1.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Struktural Eselonoring



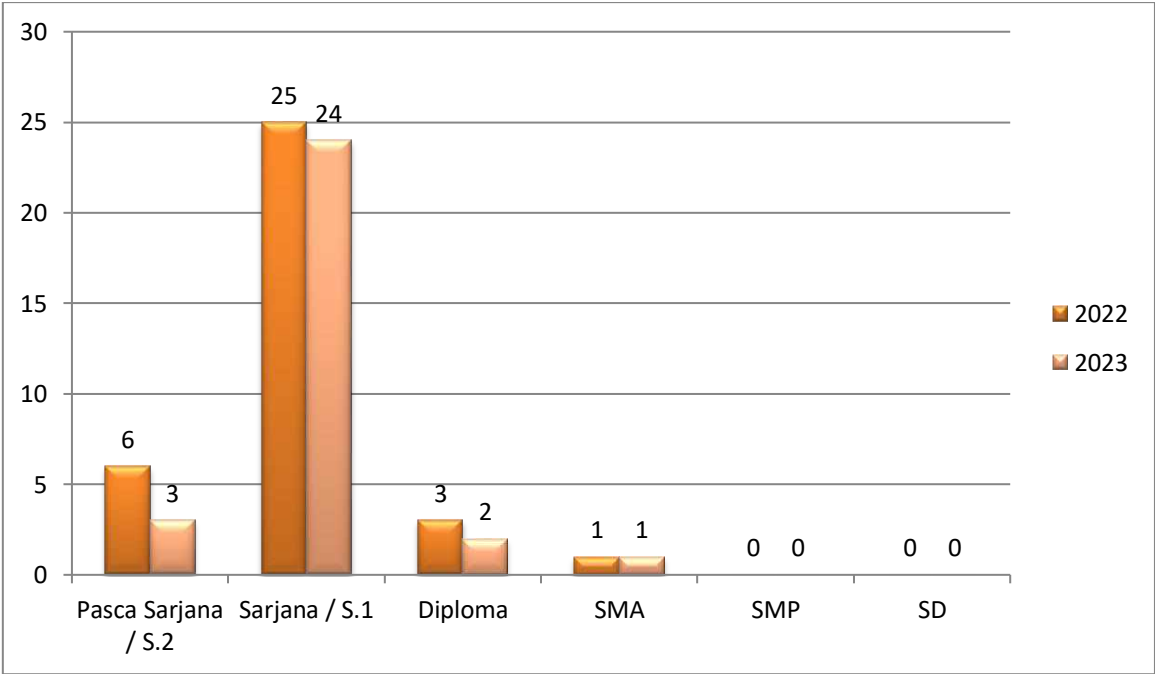
 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		2022	2023
1	Pasca Sarjana / S.2	6	3
2	Sarjana / S.1	25	24
3	Diploma	3	2
4	SMA	1	1
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
JUMLAH		35	30
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan			

- Diagram Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan



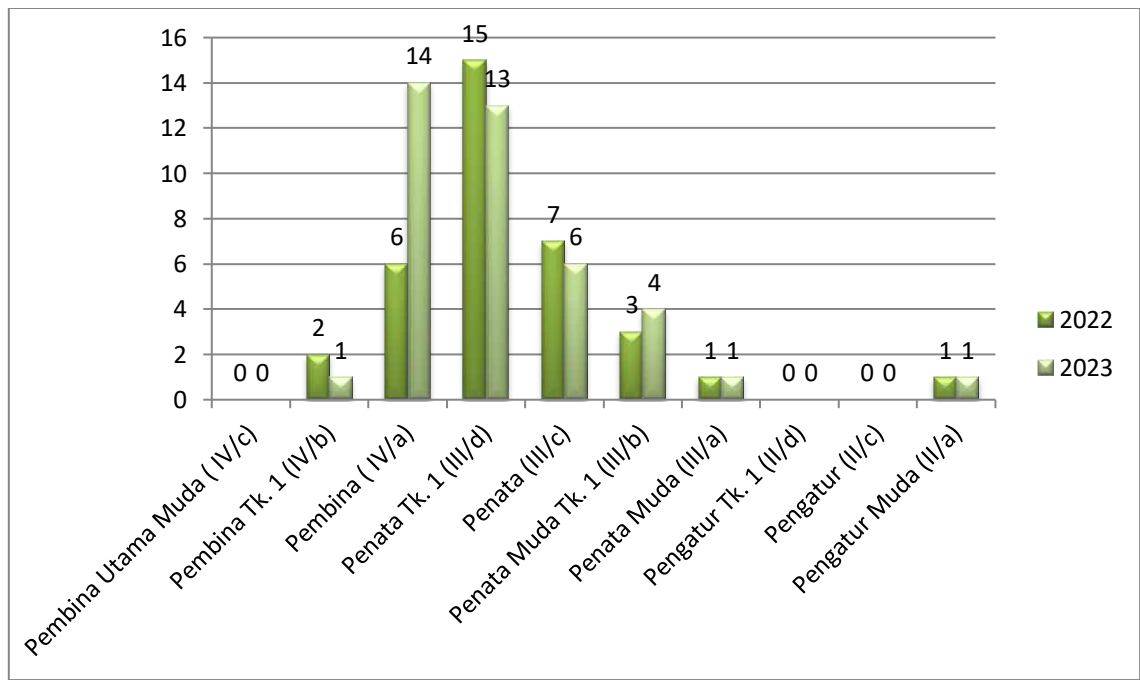
 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	Pangkat/ Golongan /Ruang	Jumlah (Orang)	
		2022	2023
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0
2	Pembina Tk. 1 (IV/b)	2	1
3	Pembina (IV/a)	6	4
4	Penata Tk. 1 (III/d)	15	13
5	Penata (III/c)	7	6
6	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	3	4
7	Penata Muda (III/a)	1	1
8	Pengatur Tk. 1 (II/d)	0	0
9	Pengatur (II/c)	0	0
10	Pengatur Muda (II/a)	1	1
JUMLAH		35	30
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan			

- Diagram Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Gambar 1.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan



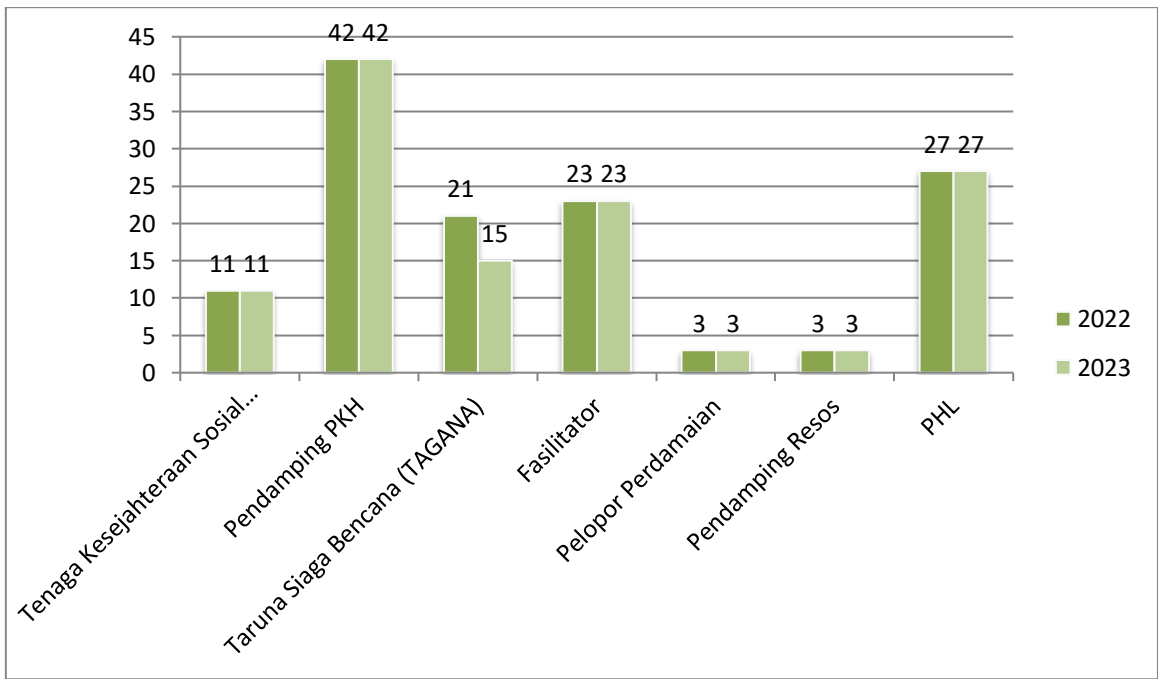
 Tenaga Pendamping dan Pekerja Sosial

Tabel 1.4
Tenaga Pendamping dan Pekerja Sosial

NO	NAMA PENDAMPING/PEKERJA SOSIAL	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	11	11
2	Pendamping PKH	42	42
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	21	15
4	Fasilitator	23	12
5	Pelopor Perdamaian	3	3
6	Pendamping Resos	3	3
7	PHL	27	27
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan			

- Diagram Pendamping dan Pekerja Sosial

Gambar 1.5
Tenaga Pendamping dan Pekerja Sosial



D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana
Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	4.152.436.700,00
1.3.1.	TANAH	1.581.000.000,00
1.3.1.01	TANAH	1.581.000.000,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.211.862.700,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	382.620.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	4.649.000,00
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	239.538.000,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	113.778.000,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	29.300.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	546.327.700,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.258.873.000,00
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	1.258.873.000,00
1.5	ASET LAINNYA	72.150.000,00
1.5. 4	ASET LAIN-LAIN	72.150.000,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	72.150.000,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan dokumen tersebut jumlah barang yang ada di Dinas Sosial berjumlah 291 dengan harga Rp. 4.152.436.700 kemudian untuk UPTD LKB jumlah barang sebanyak 47 dengan harga Rp 411.080.000.

E. Keuangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki Keuangan dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN	Tahun 2023
		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.203.061.100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.729.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.950.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.325.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.401.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.882.663.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.595.523.800
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264.620.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.944.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12.575.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.111.200
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	9.111.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.547.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.103.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.834.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.496.000
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	9.720.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.364.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.030.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.293.400
	Pengadaan Mebel	4.849.400
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.804.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.439.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.539.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.900.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	430.276.200
	Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.562.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.930.000
	Pemerliharan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.784.200
2	Program Pemberdayaan Sosial	330.632.300
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	330.632.300
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	175.303.800
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.151.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	133.177.500
3	Program Rehabilitasi Sosial	359.153.800
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	302.535.800
	Penyediaan Permakanan	122.312.800
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	78.711.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	101.512.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	56.618.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	56.618.000
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	704.296.400
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	704.296.400
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.455.200
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	528.615.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34.226.200
5	Program Penanganan Bencana	218.494.600
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	104.917.800
	Penyediaan Makanan	104.917.800
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	113.576.800
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	113.576.800
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.035.600
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34.035.600
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34.035.600
	Total	6.849.673.800

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja (LKj)

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Konerja, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

BAB I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab I (satu) ini terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan LKj
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - A. SOTK
 - B. Isu Strategis OPD
 - C. Keadaan Pegawai
 - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - E. Keuangan
- 1.5 Sistematika LKj

BAB II **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab II (dua) ini terdiri dari :

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - A. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - C. Strategis dan Arah Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja
- 2.3 Rencana Anggaran
 - A. Target Belanja
 - B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

-
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Secara lebih ringkas bab III (tiga) ini dapat disimpulkan terdiri dari :

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - ✓ Bandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - ✓ Bandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir
 - ✓ Bandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - ✓ Dilakukan Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - ✓ Di analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.3 Realisasi Anggaran
 - ✓ Tampilkan tabel realisasi anggaran disertai dengan penjelasan pencapaian terhadap target belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya
- 3.4 Inovasi Perangkat Daerah
 - ✓ Dijelaskan inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD

BAB IV	Penutup
	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pada bab IV (empat) ini terdiri dari :

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1 Perencanaan Strategis

A. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan pondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- 1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
- 2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),
- 3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok	:	merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.
Maju	:	mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.
Aman	:	adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Sejahtera	:	merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula **“CINTA BS”**

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C	= Cerdas
I	= Integritas
N	= iNovatif
T	= Tauladan
A	= Agamis
BS	= Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap

menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2) Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3) Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah. Pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun open government melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam

menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Dalam menjalankan Misi Bupati Bengkulu Selatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke Misi 1 yaitu “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing”. Untuk mewujudkan misi tersebut Serta dapat mendukung Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, maka misi yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan menjamin kesejahteraan sosial bagi PPKS.
- 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS.
- 3. Meningkatkan profesionalme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sebagai metode peanggulangan kemiskinan.
- 4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 – 2026 menetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.1
Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing. 2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

dan berdaya saing.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dari misi yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melindungi PPKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial.
2. Terwujudnya aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.
3. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran).
4. Terjaminnya PPKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah.
5. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
6. Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PPKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Sasaran – sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, meliputi :

1. Mencegah PPKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial.
2. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PPKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial.
3. Memberikan dukungan bagi PPKS baik kelompok rentan maupun kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial.

4. RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah dasar).
5. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal.
6. Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis.
7. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
8. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik.
9. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar.
10. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial.
11. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial
12. Tersedianya layanan PPKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional.
13. Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1 atau D-4 pekerjaan sosial.
14. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan.
15. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pelayanan, rehabilitasi sosial baik panti diluar panti Kabupaten/kota dan non panti.

C. Strategi Dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka pelayanan sosial
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah sosial
- c. Menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat
- d. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi pemerintah dan swasta

2. Kebijakan :

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial, menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pendidikan dan latihan

- b. Membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan
- c. Mengelola data base dan informasi dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Menjalni koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal
- e. Membentuk kelompok-kelompok bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara kolektif.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
MISI	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera, Dan Berdaya Saing.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat	a. Mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka pelayanan sosial. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah sosial. c. Menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. d. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal. e. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga ekonomi pemerintah dan swasta.	a. Meningkatkan kualitas aparatur dalam bidang pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pendidikan dan latihan b. Membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan c. Mengelola data base dan informasi dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi d. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik secara horizontal maupun vertikal e. Membentuk kelompok-kelompok bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara kolektif.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya, selain itu Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan kinerja yang baik berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, program dan sasaran serta target kinerja Pemerintah Daerah, Kami Dinas Sosial berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi yang diemban,

Komitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju good government dan clean governance. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya. berdasar hal tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan perjanjian kinerjanya sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial	Persentase	100%

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah :
- APBD = Rp. 6.514.572.400
- APBN = Rp. -

PIHAK KEDUA,


BUPATI BENGKULU SELATAN
GUSMAN MULYADI, SE., MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN


EREDY GUNAWAN, S.STP.M.SI
NIP. 19820221 200212 1 001

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		
	1) Masyarakat Yang Mendapat Jaminan Sosial dan Pelayanan	100 %	5 Komponen SPM: 1. Pelayanan Disabilitas di Luar Panti 2. Pelayanan Lansia di Luar Panti 3. Pelayanan Anak Terlantar di Luar Panti 4. Pelayanan Pengemis dan Gelandangan di Luar Panti 5. Pelayanan Kebencanaan
2	Penguatan AKIP dan Reformasi Birokrasi pada OPD	BB	
	1) Perencanaan Kinerja	26	Dari Bobot 30
	2) Pengukuran Kinerja	26	Dari Bobot 30
	3) Pelaporan Kinerja	13	Dari Bobot 15
	4) Evaluasi Kinerja	22	Dari Bobot 25
3	Nilai PMPRB OPD	B	
4	Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan	5 Inovasi	Kelengkapan Dokumen
5	Penerapan dan Evaluasi SPIP pada OPD	1 Dokumen	Laporan Pelaksanaan SPIP
6	Pertisipasi dalam Agenda Pemerintahan		
	1) Rapat Penting DPRD	100 %	Evaluasi per triwulan
	2) Rapat Penting Kedinasan	100 %	
7	Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif dan Keterbukaan	Publikasi informasi pada kanal yang dimiliki

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Dalam menjalankan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai target belanja pertriwulan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target Belanja

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Target Belanja				
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Total Anggran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.043.750	Rp. 9.043.750	Rp. 8.937.950	Rp. 14.967.650	Rp. 41.993.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 3.300.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.601.900	Rp. 7.433.200	Rp. 16.335.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 13.685.000	Rp. 13.000.000	Rp. 11.194.700	Rp. 28.521.500	Rp. 66.401.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 893.599.912	Rp. 893.599.912	Rp. 893.599.912	Rp. 914.724.096	Rp. 3.595.523.800
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 65.280.000	Rp. 65.280.000	Rp. 65.280.000	Rp. 68.780.000	Rp. 264.620.000

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 3.190.000	Rp. 3.150.000	Rp. 2.165.200	Rp. 1.439.600	Rp. 9.944.800
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 3.143.750	Rp. 3.143.750	Rp. 3.143.750	Rp. 3.143.750	Rp. 12.575.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp. 2.277.800	Rp. 2.277.800	Rp. 2.277.800	Rp. 2.277.800	Rp. 9.111.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.275.750	Rp. 1.275.750	Rp. 1.275.750	Rp. 1.275.750	Rp. 5.103.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.660.000	Rp. 3.660.000	Rp. 3.660.000	Rp. 18.854.000	Rp. 29.834.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.624.225	Rp. 15.624.225	Rp. 15.624.225	Rp. 15.624.225	Rp. 62.496.900
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp. 1.293.050	Rp. 1.293.050	Rp. 1.293.050	Rp. 5.840.850	Rp. 9.720.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 841.000	Rp. 841.000	Rp. 841.000	Rp. 841.000	Rp. 3.364.000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 50.606.250	Rp. 50.606.250	Rp. 50.606.250	Rp. 241.211.250	Rp. 393.030.000
	Pengadaan Milik Penunjang Pemerintah Daerah	Barang Daerah Urusan Daerah	Pengadaan Mebel	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.489.400	Rp. 4.489.400
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 9.676.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 120.128.000	Rp. 129.804.000
	Penyediaan Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Urusan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 9.901.750	Rp. 9.305.250	Rp. 9.901.750	Rp. 27.430.650	Rp. 56.539.400
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000	Rp. 49.600.000	Rp. 61.900.000
	Pemeliharaan Milik Penunjang Pemerintahan Daerah	Barang Daerah Urusan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 27.628.750	Rp. 26.628.750	Rp. 25.628.750	Rp. 90.675.750	Rp. 170.562.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.060.000	Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000	Rp. 9.470.000	Rp. 16.930.000
			Pemerlihaaran/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Rp. 192.784.200	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000	Rp. 242.784.200
Program Pemberdayaan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga	Rp. 45.595.300	Rp. 43.746.000	Rp. 44.638.500	Rp. 41.324.000	Rp. 175.303.800

Sosial	Sosial Kabupaten/Kota	Daerah	Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 6.318.000	Rp. 5.959.000	Rp. 5.959.000	Rp. 5.883.000	Rp. 24.151.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 16.741.500	Rp. 16.741.500	Rp. 16.741.500	Rp. 81.073.000	Rp. 131.177.500
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Penyediaan Permakanan	Rp. 22.582.650	Rp. 21.773.750	Rp. 22.582.650	Rp. 55.373.750	Rp. 122.312.800
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 19.677.750	Rp. 19.677.750	Rp. 19.677.750	Rp. 19.677.750	Rp. 78.711.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 13.889.250	Rp. 12.886.250	Rp. 13.889.250	Rp. 60.847.250	Rp. 101.512.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 7.563.500	Rp. 7.563.500	Rp. 7.563.500	Rp. 33.927.500	Rp. 56.618.000

	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.818.800	Rp. 19.818.800	Rp. 19.818.800	Rp. 81.998.800	Rp. 141.455.200
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 149.619.750	Rp. 136.010.750	Rp. 112.079.750	Rp. 130.904.750	Rp. 528.615.000
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 10.144.100	Rp. 9.679.000	Rp. 10.144.100	Rp. 4.309.000	Rp. 34.226.200
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Rp. 22.374.300	Rp. 21.621.500	Rp. 19.101.500	Rp. 41.820.500	Rp. 104.917.800
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 15.790.95	Rp. 15.144.450	Rp. 15.790.950	Rp. 66.850.450	Rp. 113.576.800
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 7.390.800	Rp. 5.891.000	Rp. 7.390.800	Rp. 13.363.000	Rp. 34.035.600

2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan sasaran dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per Sasaran

NO	SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
1	Meningkatnya Nilai AKIP OPD	Rp. 5.203.061.100 (Gaji : Rp3.595.523.800)	75,9% (Termasuk di dalamnya gaji pegawai sebesar : 52,4%)
2	Meningkatkan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat	Rp. 330.632.200	4,8 %
3	Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial,kemandirian PPKS, Keberfungsian sosial	Rp. 359.153.800	5,24%
4	Meningkatnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp. 704.296.200	10,2%
5	Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial	Rp. 218.494.600	3,18%
6	Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan dan retoratsi sosial	Rp. 34.035.600	0,49%
Total		Rp. 6.849.673.800	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bagian ini disajikan uraian hasil capaian indikator kinerja utama perangkat daerah, evaluasi dan capaian kinerja, realisasi anggaran, dan inovasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang telah dituliskan di atas, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dari target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat diukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1
Pencapaian IKU Dinas Sosial
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2022 DAN 2023

IKU Eselon II

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tahun 2022		Sumber Data	Penanggung Jawab
						Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kemandirian PMKS dan PSKS	1. Persentase PMKS yang tercakup program perlindungan sosial	1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat	1. Presentase PMKS yang tercakup program perlindungan sosial	$\frac{\sum PMKSt_{hn}(n) \text{ yang mendapat manfaat}}{\sum JumlahPMKS(n)} \times 100\%$	30 %	30%	Data Siks-NG	Dinas Sosial

IKU ESELON II

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target Kinerja Tahun 2023		Sumber Data	Penanggung Jawab
						Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya kemandirian PPKS dan PSKS	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat	1. Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial	$\frac{\sum \text{Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Korban Bencana Alam/Sosial thn (n)}}{\sum \text{Jumlah Yang Tertangani (n)}} \times 100\%$	100 %	100 %	Dinas Sosial	Dinas Sosial

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



ERFEDY GUNAWAN, S.STP.M.Si

NIP. 19820221 200212 1 001

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial pada tahun 2023 yaitu Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial. SPM yang dimaksud dalam hal ini adalah yang SPM yang berkaitan dengan bidang sosial diantaranya: Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Korban Bencana Alam/Sosial. Berdasarkan indikator tersebutlah maka fokus kerja yang dilakukan Dinas Sosial pada tahun 2023 yakni melaksanakan pelayanan SPM dengan semaksimal mungkin dengan capaian SPM Dinas Sosial 100% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian SPM

NO	JENIS SPM	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI	TOTAL PENCAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	380	380	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	252	252	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	322	322	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	40	40	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	138	138	100%
<i>Sumber:Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan</i>				

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada, berikut dipaparkan melalui tabel dibawah ini capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

	INDIKATOR KINERJA UTAMA			TAHUN 2022					TAHUN 2023				
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN	REALISASI KINERJA (%)	CAPAIAN FISIK (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN	REALISASI KINERJA (%)	CAPAIAN FISIK (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp. 32.098.800	100%	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp. 41.719.000	99,35%	100%
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp. 5.959.200	99,1%	100%	2 Laporan	2 Laporan	Rp. 16.099.250	98,56%	100%

			Evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Rp. 40.949.600	100%	100%	7 Laporan	7 Laporan	Rp. 65.568.900	98,75%	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	35 OB	35 OB	Rp. 3.534.825.058	92 %	100%	30 Orang	30 Orang	Rp. 3.371.096.299	93,76%	100%
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 177.100.000	98%	100%	12 dokumen	12 dokumen	Rp. 264.620.000	100%	100%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	12 dokumen	12 dokumen	Rp. 9.715.500	97,69%	100%
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 11.069.400	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	Rp. 12.369.700	98,37%	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	100%	Rp. 11.253.800	100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 8.992.200	98,69%	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 paket	50 paket	Rp. 4.010.000	99%	100%	50 paket	50 paket	Rp. 5.073.600	99,42%	100%
			Penyediaan Peralatan dan	-	-	-	-	-	20 Paket	20 Paket	Rp. 29.834.000	100%	100%

			Perlengkapan Kantor										
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 39.684.000	99 %	100%	15 paket	15 paket	Rp. 62.219.050	99,56%	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 5.022.000	95,8%	100%	2 paket	2 paket	Rp. 9.719.680	100%	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	-	-	-	-	-	667 Dokumen	667 Dokumen	Rp. 3.284.000	97,62%	100%
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Rp. 133.722.052	99,9%	100%	100 Laporan	100 Laporan	Rp. 393.023.051	100%	100%
			Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	Rp. 4.480.000	99,79 %	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit	Rp. 13.643.600	58,92%	100%	11 unit	11 unit	129.650.000	99,88%	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 31.203.445	92,7%	100%	12 laporan	12 laporan	Rp. 46.615.553	82,45%	100%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 8.040.000	100%	100%	12 laporan	12 laporan	Rp. 61.900.000	100%	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	12 Bulan	12 Bulan	Rp. 49.454.501	90 %	100%	10 unit	10 unit	165.753.500	97,18%	100%

			Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	11 unit	11 unit	Rp. 5.280.000	100%	100%	11 unit	11 unit	Rp. 16.930.000	100%	100%
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	Rp. 241.757.800	99,58%	100%
2	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	11 orang	Rp. 10.154.600	100%	100%	-	-	-	-	-
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	Rp. 176.299.700	97,24%	100%	11 orang	11 orang	Rp. 171.212.600	97,67%	100%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 KPM	5000 KPM	Rp. 52.021.000	99,9%	100%	30 keluarga	30 keluarga	Rp. 23.873.200	98,85%	100%

			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Poskesus	80 Poskesus	Rp. 141.619.200	99,8%	100%	8 Lembaga	8 Lembaga	Rp. 130.833.000	99,74%	100%
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	30 orang	30 orang	Rp. 32.703.000	100%	100%	175 orang	175 orang	Rp. 121.784.600	99,57%	100%
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlanat, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	23 KPM	23 KPM	Rp. 32.703.000	100%	100%	-	-	-	-	-
			Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual,dan sosial	-	-	-	-	-	18 orang	18 orang	Rp. 78.627.000	99,89%	100%
			Pemberian layanan kedaruratan	20 orang	20 orang	Rp. 40.843.000	100%	100%	31 orang	31 orang	Rp. 101.478.500	99,97%	100%

		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian bimbingan fisik,mental,spiritual, dan sosial	30 orang	3 0 orang	Rp. 26.425.300	100%	100%	90 orang	90 orang	Rp. 56.529.000	99,84%	100%
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota	13.609 KK	13.609 KK	Rp. 78.300.000	100%	100%	5500 orang	5500 orang	Rp. 141.148.200	99,78%	100%
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	6681 Keluarga	6681 Keluarga	Rp. 92.415.600	17,48%	100%
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50 Kelompok	50 Kelompok	Rp. 6.136.400	100%	100%	50 orang	50 orang	Rp. 18.067.500	52,79%	100%
5	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	2000 KPM	2000 KPM	Rp. 602.744.800	87,9%	86,6%	40 orang	40 orang	Rp. 87.300.928	83,21%	100%
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	11 Kecamatan	11 Kecamatan	Rp. 55.809.600	98%	100%	21 orang	21 orang	Rp. 110.683.800	97,45%	100%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kab/kota	33 Makam	33 Makam	Rp. 42.773.960	99,9%	100%	33 Makam	33 Makam	Rp. 33.907.900	99,62%	100%

7	UPTD LBK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD.	12 Buah	12 Buah	2.600.000	100%	100%	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	90%	90%	3.144.000	100%	100%	-	-	-	-	-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 Buah	100 Buah	8.778.000	100%	100%	-	-	-	-	-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000 Buah	4.000 Buah	3.347.500	100%	100%	-	-	-	-	-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400 Eksemplar	400 Eksemplar	2.700.000	89%	100%	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Kali	5 Kali	28.582.000	100%	100%	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	1.538.321	64%	100%	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	19.070.500	100%	100%	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	1 Unit	30.000.000	100%	100%	-	-	-	-	-

			Lainnya										
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlanat, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	30 Orang	30 Orang	37.410.000	94,8%	100%	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

- Keterangan: Program, Kegiatan dan Sub kegiatan UPTD LBK untuk Tahun Anggaran 2023 digabung dengan Anggaran Dinas

B. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Sosial diberikan kewenangan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), upaya pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan agar PPKS bisa memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat. Dinas Sosial sebagai OPD yang menjalankan pelayanan dibidang sosial sukses memberikan pelayanan yang optimal dengan didapatkannya Nilai Standar Pelayanan Publik Dengan Nilai A dari Ombudsman RI, Capaian indeks kepatuhan pelayanan publik dari Kemenpanrb dengan Nilai B, Serta capaian SPM yang 100% di tahun 2023. Dalam penyelenggaran urusan bidang sosial yang telah dicapai tentu Dinas Sosial melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja guna peningkatan pelayanan yang jauh lebih baik kedepannya sesuai dengan sasaran perangkat daerah yaitu: “Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat”.

Dalam langkah terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial,kemandirian PPKS, Keberfungsian sosial, Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan agenda sebagai berikut:



• *Gambar 3.1 Respon kasus an. Sulaimi desa jeranglah tinggi, 03 januari 2023 oleh Bidang Resos*



• *Gambar 3.2 Respon kasus disabilitas mental an. Aprina wati desa air sulau, 06 januari 2023 oleh Bidang Resos*



• *Gambar 3.3 Pendampingan petugas dinsos bengkulu dalam melaksanakan home visit pada calon orang tua asuh di perumnas kayu kunyit.*



• *Gambar 3.4 Dinsos Diversi Bersama Polres Bengkulu Selatan, Penangan Anak Berhadapan Dengan Hukum*



• **Gambar 3.5** Penyaluran Bantuan Sembako An. Nayasmah (STRUK) Desa Suka Rami Kec. Air Nipis 26 Mei 2023



• **Gambar 3.6** Penyaluran Bantuan Sembako An. Jelman (Rumah Tidak Layak Huni) Desa Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna, 12 Mei 2023

Dalam langkah Meningkatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanganan Fakir miskin melakukan agenda sebagai berikut:



• **Gambar 3.7** Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIKS-NG



• **Gambar 3.8** Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi SIKS-NG



• **Gambar 3.9** Musyawarah Verifikasi Dan Validasi Data Bantuan Sosial



• **Gambar 3.10** Monitoring Dan Evaluasi Usulan Rumah Sejahtera Terpadu

Dalam langkah penanganan korban bencana alam/sosial, Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial program penanganan bencana melakukan agenda sebagai berikut:



• *Gambar 3.11 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial (kebakaran rumah) di Desa padang gilang kecamatan manna*



• *Gambar 3.12 Pemberian bantuan alam untuk korban rumah tertimpah pohon bencana alam di Desa tungkal I Kecamatan Pino Raya*



• *Gambar 3.13 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial (kebakaran rumah) di Desa Padang Pandan Kecamatan Manna*



• *Gambar 3.14 Pemberian bantuan untuk korban bencana sosial kebakaran rumah bencana sosial di JL. Buldani Masik Kel. Ibul Kecamatan Kota Manna*

Dalam langkah meningkatkan pelayanan sosial kelembagaan masyarakat dan meningkatkan nilai nilai kepahlawanan dan retorasi sosial, Dinas Sosial melalui Bidang Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melakukan agenda sebagai berikut:



• *Gambar 3.15 Rakor Fasilitator Dan Supervisor*



• *Gambar 3.16 Bimtek Puskesmas Desa/Kel*



• *Gambar 3.17 Rakor TSKK*



Gambar 3.18 Pendampingan Akreditasi Lks Oleh Bbpps Padang



• *Gambar 3.19 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan "Semaku"*



Gambar 3.20 Ziarah Nasional Peringatan Hut RI Ke 78

Peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang masalah di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlahnya cukup besar, Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan menganalisis faktor – faktor : kekuatan (Strength), dan Kelemahan (Weakness) dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan analisis lingkungan Internal, dan analisis lingkungan eksternal adalah analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang(Opportunities) dan ancaman (Treaths), adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan adalah sumber daya, potensi atau keunggulan relatif lainnya atau keunggulan komperatif yang dimiliki dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun kekuatan yang ada meliputi :

- Peraturan perundang-undangan
- Adanya instansi pembina teknis

- Tersedianya Kebijakan pemerintah daerah
- Tersedianya SDM Pelaksana kesos yang profesional
- Adanya peran Organisasi sosial, LSM yang ikut berpartisipasi dalam penanganan PPKS

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun kelemahan yang ada meliputi :

- Belum adanya Perda tentang PPKS secara keseluruhan
- Rendahnya aksesabilitas dan fasilitas PPKS
- Terbatasnya anggaran penanganan PPKS
- Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menurunkan jumlah PPKS,

3. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan situasi yang menguntungkan dalam pembangunan. Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi :

- Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait
- Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha
- Adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- Adanya panti-panti sosial dan PSKS

4. Tantangan (Treathment)

Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi pembangunan. Ancaman dapat berupa rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari pembangunan yang dilakukan. Adapun ancaman yang ada dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi :

- Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.
- Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
- Rendahnya partisipasi sosial masyarakat

5. Analisis SWOT Untuk ASP

Tabel 3.4
Analisis SWOT Untuk ASP

ANALISIS SWOT UNTUK ASP

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weaknesses)
	1. Tersedianya peraturan perundang-undangan	1. Belum ada Perda tentang PPKSsecara keseluruhan
	2. Adanya Instansi pembina teknis	2. Rendahnya aksesibilitas dan fasilitas PMKS
	3. Kebijakan pemerintah daerah	3. Belum profesionalnya SDM penanganan PMKS
Peluang (Oppertunities)	Strategi SO	Strategi WO
1. Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait	1. Dayagunakan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait	1. Usahakan lahirnya Perda tentang PPKS secara keseluruhan
2. Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha	2. Optimalkan Instansi pembina teknis dengan adanya dukungan panti-panti sosial dan PSKS	2. Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PPKSdengan mendayagunakan panti-panti sosial dan PSKS
3. Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat	3. Mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah daerah dengan mengadakan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	3. Tingkatkan profesionalitas SDM penanganan PPKSdengan adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
4. Adanya panti-panti sosial dan PSKS		
Ancaman (Threats)	Strategi ST	Strategi WT
1. Multikrisis yang berkepanjangan dan kompleks dapat menyebabkan rentannya ketahanan sosial.	1. Optimalkan peraturan perundang-undangan yang ada guna mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul akibat multikrisis yang berkepanjangan	1. Usahakan Perda tentang PPKS secara keseluruhan
2. Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil	2. Memantapkan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup penyempurnaan terus menerus sehingga mencerminkan pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial yang semakin berkualitas dan akuntabel	2. Tingkatkan aksesibilitas dan fasilitas PPKSdalam menghadapi kondisi ekonomi, politik yang belum stabil
3. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat	3. Manfaatkan kebijakan pemerintah daerah guna meningkatkan partisipasi sosial masyarakat	3. Kembangkan dan mantapkan profesionalitas SDM yang menangani PPKSuntuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tataran menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Bengkulu Selatan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah Permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- Belum optimalnya program pemberdayaan PPKS, dan masih perlu ditingkatkannya pelayanan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Belum Optimalnya dalam pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial,
- Masih rendahnya persentase PPKS dan keluarga miskin yang memperoleh akses bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),
- Belum tersedianya pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar disabilitas dan tuna sosial.
- Belum Optimalnya kabupaten dalam pelaksanaan pendataan
- Masih terbatasnya jangkauan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Berbagai permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan

sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Dengan melihat masih adanya masalah yang dihadapi maka tentu harus ada solusi yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- Pengoptimalan program pemberdayaan PPKS, dan peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial,.
- Peningkatan persentase PPKS dan keluarga miskin yang memperoleh akses bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- Pengoptimalan alokasi anggaran OPD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Penyediaan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar disabilitas dan tuna sosial.
- Pengoptimlan pelaksanaan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masih terbatasnya jangkauan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2021-2026, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PPKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Optimalisasi peran pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	Belum optimalnya program pemberdayaan PPKS, dan masih perlu ditingkatkannya pelayanan dan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	- Pembina dan Pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai standar pelayanan - lemahnya kualitas administrasi manajemen PSKS dalam pelayanan
		Taraf Kehidupan Fakir Miskin belum layak	- kurang maksimalnya fasilitasi dan pelatihan bagi fakir miskin - Alokasi dana perbaikan RTLH belum optimal
2	Optimalisasi pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial	Belum optimalnya program rehabilitasi dalam pemenuhan hak dasar	- Kurang optimalnya penanganan rehabilitasi PPKS - Masih rendahnya mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sector dengan lembaga terkait

		Belum terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dan lansia terlantar	- Belum optimalnya sarana prasarana kebutuhan dasar anak terlantar dan lansia terlantar - Belum maksimalnya terfasilitasi pelayanan pengasuhan rehabilitasi anak terlantar dan lansia
		Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang penyakit sosial (Eks NAPI,Eks Narkoba,Kelompok minoritas dan penyakit sosial lainnya)	- Masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Eks Penyandang penyakit sosial
		Belum optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Eks Penyakit Sosial	- Belum optimalnya rehabilitasi pemberdayaan keterampilan bagi penyandang penyakit sosial
	Optimalisasi Peran dan Fungsi Pelayanan Panti dan Rumah Singgah bagi PPKS	Belum optimalnya Sarana dan SDM Pelayanan Rehabilitasi bagi PPKS	- Ketersediaan kelengkapan Sarana Prasarana Pendukung Panti DALAM Rehabilitasi Sosial - Masih minimnya kemampuan petugas UPT Rehabilitasi PPKS
3	Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Belum optimalnya kelengkapan fasilitas penanganan korban bencana	- Belum terpenuhinya kelengkapan mitigasi,kesiap siagaan korban bencana
		Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) belum menyeluruh	- Belum terfasilitasinya pembentukan KSB sesuai standar
		Masih rendahnya PPKSyang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya	- Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial - Masih rendahnya mekanisme koordinasi lintas program dan lintas sector dengan lembaga terkait
		Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas	- Ketersediaan fasilitas sarana prasarana dan pemberdayaan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas belum optimal
4	Belum terkelolanya data PPKSdan PSKS secara Optimal	Ketersediaan data <i>By Name By Addres</i> (BNBA) belum tervalidasi secara <i>Update</i>	- Perlu adanya Pendataan (Verifikasi dan Validasi) Pemutahiran data PPKSdan PSKS - Belum terbangunnya system data terpadu sebagai sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PPKSdan pemberdayaan PSKS

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada pencapaian kinerja (Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial tahun 2023) pada table berikut :

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial	100%	89,47	10,53

Sumber: Diolah Oleh Tim Penyusun Lkj Dinsos Bengkulu Selatan

- Keterangan :
- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
 - Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
 - Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Pada pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023, berdasarkan Tabel 3.5 diatas, walaupun tingkat efisien penyerapan anggaran atas capaian kinerja terjadi efisien akan tetapi pada pencapaian sasaran strategis adalah memuaskan yang terlihat dari Pencapaian Indikator untuk Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dengan Kriteria “Tinggi” dan Pencapaian Indikator Indeks Capaian 100% “Paripurna Tuntas”.

Secara keseluruhan, dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Sosial melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan yang mana digabung dengan UPTD LBK. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 100%, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,203,061,100	100%	95.34	Efisien
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124,729,400	100%	98.92	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,882,663,600	100%	94.21	Efisien
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,111,200	100%	98.69	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,547,900	100%	99.92	Efisien
Pengadaan Barang Milik Daerah	134,293,400	100%	99.88	Efisien
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,439,400	100%	91.62	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430,276,200	100%	98.64	Efisien
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	330,632,300	100%	98.57	Efisien

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	330,632,300	100%	98.57	Efisien
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	359,153,800	100%	99.80	Efisien
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	302,535,800	100%	99.79	Efisien
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	56,618,000	100%	99.84	Efisien
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	704,296,400	100%	35.73	Efisien
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	704,296,400	100%	35.73	Efisien
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	218,494,600	100%	90.61	Efisien
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	104,917,800	100%	83.21	Efisien
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	113,576,800	100%	97.45	Efisien
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	34,035,600	100%	99.62	Efisien
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34,035,600	100%	99.62	Efisien

Sumber: Diolah Oleh Tim Penyusun Lkj Dinsos Bengkulu Selatan

Secara keseluruhan pada tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi penggunaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian kinerja 100% dengan tingkatan efisiensi yang efisien.

3.3 Realisasi Anggaran

Sesuai RAPBD tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 6.849.673.800,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.643.123.800,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.621.256.600,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 134.293.400,-. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 435.000.000,- . Belanja Hibah Sebesar Rp. 16.000.000,-. Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, Belanja Modal digunakan untuk pengadaan, 6 buah Laptop, 3 buah Printer, 1 unit Meja Rapat Pimpinan, , sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Realisasi keuangan belanja urusan penunjang sebesar 95,24% dengan penyerapan dana sebesar Rp 4.960.421.083,-

Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan	Dana Kegiatan			Output (keluaran)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,203,061,100	4,960,421,083	95.34	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124,729,400	123,387,150	98.92	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,993,100	41,719,000	99.35	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,335,100	16,099,250	98.56	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,401,200	65,568,900	98.75	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,882,663,600	3,657,801,499	94.21	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,595,523,800	3,371,096,299	93.76	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	264,620,000	264,620,000	100.00	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,944,800	9,715,500	97.69	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,575,000	12,369,700	98.37	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,111,200	8,992,200	98.69	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,111,200	8,992,200	98.69	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,547,900	503,153,381	99.92	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,103,000	5,073,600	99.42	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,834,000	29,834,000	100.00	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

				yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,496,900	62,219,050	99.56	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,720,000	9,719,680	100.00	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,364,000	3,284,000	97.62	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393,030,000	393,023,051	100.00	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134,293,400	134,130,000	99.88	
Pengadaan Mebel	4,489,400	4,480,000	99.79	Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129,804,000	129,650,000	99.88	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118,439,400	108,515,553	91.62	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,539,400	46,615,553	82.45	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,900,000	61,900,000	100.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430,276,200	424,441,300	98.64	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170,562,000	165,753,500	97.18	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,930,000	16,930,000	100.00	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242,784,200	241,757,800	99.58	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	330,632,300	325,918,800	98.57	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	330,632,300	325,918,800	98.57	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	175,303,800	171,212,600	97.67	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	24,151,000	23,873,200	98.85	Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota				
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	131,177,500	130,833,000	99.74	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	359,153,800	358,419,100	99.80	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	302,535,800	301,890,100	99.79	
Penyediaan Permakanan	122,312,800	121,784,600	99.57	Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	78,711,000	78,627,000	99.89	Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberian Layanan Kedaruratan	101,512,000	101,478,500	99.97	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	56,618,000	56,529,000	99.84	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56,618,000	56,529,000	99.84	Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	704,296,400	251,631,300	35.73	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	704,296,400	251,631,300	35.73	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141,455,200	141,148,200	99.78	Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	528,615,000	92,415,600	17.48	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34,226,200	18,067,500	52.79	Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	218,494,600	197,984,728	90.61	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan	104,917,800	87,300,928	83.21	

Sosial Kabupaten/Kota				
Penyediaan Makanan	104,917,800	87,300,928	83.21	Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	113,576,800	110,683,800	97.45	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	113,576,800	110,683,800	97.45	Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	34,035,600	33,907,900	99.62	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34,035,600	33,907,900	99.62	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	34,035,600	33,907,900	99.62	Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Sumber: Diolah Oleh Tim Penyusun Lkj Dinsos Bengkulu Selatan

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada Dinas Sosial Tahun 2023 rata-rata diatas 93,01 %, dari 33 sub kegiatan hanya terdapat 3 sub kegiatan yang realisasi anggaran dibawah 90%, yaitu untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat serta Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, dimana sub kegiatan ini terdapat pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana.

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Bengkulu Selatan diwajibkan untuk melakukan inovasi. Dinas Sosial selaku organisasi yang bergerak dibidang sosial membuat inovasi yaitu TRC ODGJ dan GELISIA (Gerakan Peduli Lansia).

A. TRC ODGJ

Gangguan jiwa yang banyak dijumpai di masyarakat begitu variatif seperti skizoprenia, gangguan bipolar, depresi, gangguan cemas dan panik, gangguan ketergantungan zat, alkohol dan rokok, gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja (autism, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif) dan lain-lain. Pada tahapan gangguan jiwa, jenis penyakit gangguan jiwa skizofrenia termasuk dalam gangguan jiwa berat, berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2020 berjumlah 354 orang penderita ODGJ di Kabupaten Bengkulu Selatan

ODGJ/ Penyandang disabilitas mental psikotik dapat mendapatkan pengobatan dan perawatan di puskesmas, RSUD, RSJ dan dibantu oleh peran serta masyarakat maupun balai rehabilitasi sosial serta pemberdayaan keluarga yang dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas mental psikotik. Jika masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya dapat merawat dan memperlakukan penyandang disabilitas mental psikotik layaknya orang normal maka penyandang mental disabilitas psikotik akan mendapatkan pelayanan dan pembimbingan yang terus menerus sehingga tingkat kekambuhan dan potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal.

Keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) pada umumnya sangat memperihatinkan dengan kondisi mereka di pasung, di rantai, di kurung dikarenakan dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan terhadap penanganan masalah kejiwaan serta kondisi ekonomi keluarga yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang kurang wajar. Hal ini sangatlah perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dalam menyikapi permasalahan terhadap orang dengan gangguan jiwa, untuk itu pemerintah daerah untuk bias memberikan intervensinya.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu membentuk Tim Reaksi Cepat untuk melaksanakan kegiatan evakuasi terhadap orang dengan gangguan jiwa (TRC ODGJ) dengan tujuan membantu, menolong keluarga penderita gangguan jiwa untuk bisa dilaksanakan pengobatan dan rehabilitasi social.

1. Tujuan Inovasi Daerah

- Pelayanan Rujukan Kedaruratan yang semakin mudah dan disederhanakan

- Terarah dan tersusun rangkaian pelaksanaan kegiatan evakuasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- Terlaksananya kegiatan evakuasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan cepat, tepat, sigap dan benar
- Rentang waktu penerima layanan lebih tepat, cepat dan terintegrasi

2. Manfaat yang diperoleh

- Efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan dalam hal ini Penyandang Disabilitas/ ODGK dan Keluarga
- Akses layanan yang semakin mudah
- Data dan informasi disampaikan cepat

3. Hasil Inovasi

- Bengkulu Selatan Bebas Pasung dan tertanganinya ODGJ/ Penyandang Disabilitas terlantar terutama yang di jalanan.
- Terintegrasinya Penyelenggara Layanan yang berpusat di Dinas Sosial dengan penyelenggara setiap Desa/ Kelurahan kepada masing masing Stakeholder yang menjadi Rujukan.
- Meningkatnya layanan kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) secara menyeluruh

B. GELISIA (Gerakan Peduli Lansia)

Aktifitas para lansia di lingkungan masyarakat sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semua khususnya keluarga dan pemberi pelayanan yang terkait dengan lansia. Namun, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pola yang harus diberikan kepada lansia terkadang mengakibatkan masyarakat kurang aktif terhadap kebutuhan lansia yang berujung kurangnya peran serta sosial lansia kepada masyarakat. Struktur masyarakat pada umumnya dihuni oleh beberapa kelompok usia, berdasarkan setiap kelompok usia tersebut diharapkan ada perhatian pada setiapnya tidak terlepas kelompok usia lanjut atau biasa disebut lanjut usia (60 tahun keatas).

Permasalahan lanjut usia terbesar adalah kemiskinan, mereka tidak mempunyai jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, sehingga lanjut usia masih dianggap sebagai beban bukan sebagai modal, padahal seharusnya lanjut usia harus dihargai peranannya dalam mendukung pembangunan. Selain itu lanjut usia masih banyak yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah, baik pemerintah Daerah maupun pusat.

Selain itu permasalahan lanjut usia dalam masyarakat kita cenderung terabaikan termasuk di lingkungan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa lansia merasa keadaan dirinya tidak baik diakibatkan sulitnya bersosialisasi dan mengakses pelayanan dasar. Oleh karena itu, sebuah rancangan terhadap masyarakat agar peduli terhadap lansia dipikirkan dengan mengkaitkan dengan pelayanan terkait lansia seperti Gerakan Peduli Lansia (GELISIA). Masyarakat peduli lansia ini diharapkan muncul dari perwakilan

masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial maupun relawan-relawan sosial yang sudah ada di masyarakat untuk ditambah peran sertanya dalam memberikan pendampingan kepada aktifitas dan kebutuhan lansia. Gerakan ini diharap juga bukan saja pemerintah dalam hal Dinas Sosial dapat memberikan inisiasinya, tetapi turut juga instansi lainnya bersama-sama mewujudkan program atau gerakan ini bisa berjalan dan hasilnya bermanfaat bagi lansia dan lingkungannya.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan Jumlah lanjut usia penerima program bantuan bertujuan lanjut usia sebanyak 331 jiwa, data diperoleh dari desa/kelurahan melalui petugas fasilitator dan puskesmas SLRT, TKSK.

1. Tujuan Inovasi Daerah

- Terlaksananya Pelayanan terhadap Lanjut Usia yang cepat dan tepat sasaran
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar hidup lansia
- Memberikan rasa optimis dan harapan/semangat hidup lanjut usia dalam menjalankan kehidupan.
- Keberfungsian Sosial Lanjut Usia

2. Manfaat yang diperoleh

- Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup lanjut usia
- Lansia bahagia dan sejahtera
- Lansia mampu melaksanakan fungsi Sosialnya
- Akses layanan yang semakin mudah
- Data dan informasi disampaikan cepat

3. Hasil Inovasi

- Gerakan peduli lansia (GELISIA) dapat memberikan pelayanan dasar dan kebutuhan hidup lansia di Kabupaten Bengkulu Selatan
- Terciptanya lanjut usia yang sehat, bahagia dan sejahtera serta keberfungsian sosialnya.
- Meningkatnya layanan kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Lanjut Usia secara menyeluruh

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Sosial selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4.

Dalam pencapaian tersebut secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendalakendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat.

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun berikutnya. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja adalah Sangat Baik. Dengan Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial 100% sesuai dengan target indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dan sesuai dengan penginputan capaian SPM di pelaporan SPM Bangda Kemendagri. Adapun pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,47 %.
2. Adapun pencapaian kinerja terhadap sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Pelayanan Bagi Seluruh Masyarakat
- 3. Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergi satu sama lainnya.

4.2 Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Perlu adanya perbaikan dan keselarasan sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja utama.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 dibuat, sebagai wujud keterbukaan, tanggung jawab dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekian terima kasih

LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN APBD TRIWULAN IV
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
Dinas Sosial				6.514.572.400		6.849.673.800			6.128.282.911	89,47	
XX.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.018.835.800		5.203.061.100			4.960.421.083	95,34	
XX.XX.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.212.100		124.729.400			123.387.150	98,92	
XX.XX.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	31.427.500	7	41.993.100	7 dokumen	100,00	41.719.000	99,35	
XX.XX.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	8.901.900	7	16.335.100	7 laporan	100,00	16.099.250	98,56	
XX.XX.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	39.882.700	7	66.401.200	7 laporan	100,00	65.568.900	98,75	
XX.XX.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.244.062.200		3.882.663.600			3.657.801.499	94,21	
XX.XX.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	3.960.422.400	30	3.595.523.800	30 orang/bulan	100,00	3.371.096.299	93,76	
XX.XX.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 dokumen	261.120.000	35	264.620.000	35 dokumen	100,00	264.620.000	100,00	
XX.XX.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	9.944.800	12	9.944.800	12 dokumen	100,00	9.715.500	97,69	
XX.XX.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	12.575.000	2	12.575.000	2 laporan	100,00	12.369.700	98,37	
XX.XX.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.111.200		9.111.200			8.992.200	98,69	
XX.XX.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	9.111.200	12	9.111.200	12 laporan	100,00	8.992.200	98,69	
XX.XX.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000		0			0	0	
XX.XX.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	20.000.000	0	0	0 orang	0	0	0	
XX.XX.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			293.201.100		503.547.900			503.153.381	99,92	
XX.XX.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	5.103.000	50	5.103.000	50 Paket	100,00	5.073.600	99,42	
XX.XX.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	14.640.000	20	29.834.000	20 Paket	100,00	29.834.000	100,00	
XX.XX.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	62.496.900	15	62.496.900	15 Paket	100,00	62.219.050	99,56	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.172.200	1	9.720.000	1 Paket	100,00	9.719.680	100,00	
XX.XX.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	667 dokumen	3.364.000	667	3.364.000	667 dokumen	100,00	3.284.000	97,62	
XX.XX.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	202.425.000	100	393.030.000	100 laporan	100,00	393.023.051	100,00	
XX.XX.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.676.000		134.293.400			134.130.000	99,88	
XX.XX.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0	1 unit	4.489.400	1 unit	100,00	4.480.000	99,79	
XX.XX.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	9.676.000	11	129.804.000	11 unit	100,00	129.650.000	99,88	
XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.814.000		118.439.400			108.515.553	91,62	
XX.XX.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.414.000	12	56.539.400	12 laporan	100,00	46.615.553	82,45	
XX.XX.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	16.400.000	12	61.900.000	12 laporan	100,00	61.900.000	100,00	
XX.XX.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.759.200		430.276.200			424.441.300	98,64	
XX.XX.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	105.515.000	10	170.562.000	10 unit	100,00	165.753.500	97,18	
XX.XX.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	9.460.000	11	16.930.000	11 unit	100,00	16.930.000	100,00	
XX.XX.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	192.784.200	1 unit	242.784.200	1 unit	100,00	241.757.800	99,58	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			286.366.800		330.632.300			325.918.800	98,57	
01.06.02.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			286.366.800		330.632.300			325.918.800	98,57	
01.06.02.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	191.489.800	11	175.303.800	11 orang	100,00	171.212.600	97,67	
01.06.02.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	28.151.000	50	24.151.000	50 Keluarga	100,00	23.873.200	98,85	
01.06.02.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	66.726.000	11	131.177.500	11 lembaga	100,00	130.833.000	99,74	
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			279.172.200		359.153.800			358.419.100	99,80	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
					K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
01.06.04.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					248.918.200		302.535.800			301.890.100	99,79	
01.06.04.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang			90.812.800	175	122.312.800	175 orang	100,00	121.784.600	99,57	
01.06.04.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang			25.843.400	0	0	0 orang	0	0	0	
01.06.04.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang			78.711.000	15	78.711.000	15 orang	100,00	78.627.000	99,89	
01.06.04.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang			53.551.000	31	101.512.000	31 orang	100,00	101.478.500	99,97	
01.06.04.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					30.254.000		56.618.000			56.529.000	99,84	
01.06.04.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang			30.254.000	90	56.618.000	90 orang	100,00	56.529.000	99,84	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					749.782.400		704.296.400			251.631.300	35,73	
01.06.05.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					749.782.400		704.296.400			251.631.300	35,73	
01.06.05.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5500 orang			79.275.200	5500	141.455.200	5500 orang	100,00	141.148.200	99,78	
01.06.05.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8700 Keluarga			628.101.000	6681	528.615.000	6681 Keluarga	100,00	92.415.600	17,48	
01.06.05.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang			42.406.200	50	34.226.200	50 orang	100,00	18.067.500	52,79	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					153.064.100		218.494.600			197.984.728	90,61	
01.06.06.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					87.990.800		104.917.800			87.300.928	83,21	
01.06.06.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang			87.990.800	40	104.917.800	40 orang	100,00	87.300.928	83,21	
01.06.06.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					65.073.300		113.576.800			110.683.800	97,45	
01.06.06.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang			65.073.300	21	113.576.800	21 orang	100,00	110.683.800	97,45	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			27.351.100		34.035.600			33.907.900	99,62	
01.06.07.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			27.351.100		34.035.600			33.907.900	99,62	
01.06.07.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	33 makam	27.351.100	33	34.035.600	33 makam	100,00	33.907.900	99,62	

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Catatan

* Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) = (Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x Bobot Mutu Minimal Layanan Dasar Sebesar 20) + (Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar x Bobot Penerima Layanan Dasar Sebesar 80)

Filter :
Anda Mengisi Triwulan :

Triwulan 4

LIHAT CAPAIAN TW LAINYA

Capaian SPM

Kegiatan dan Anggaran SPM

Permasalahan

KABUPATEN/KOTA : KAB. BENGKULU SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		380	380	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	

Simpan

Batal / Kembali

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7 -8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		380	380	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	113	113	0	100.00%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	31	31	0	100.00%	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	87	87	0	100.00%	
	4. Penyediaan sandang	Orang	7	7	0	100.00%	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	26	26	0	100.00%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	31	31	0	100.00%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	31	31	0	100.00%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar	Orang	31	31	0	100.00%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	4	4	0	100.00%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	4	4	0	100.00%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100.00%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100.00%	
	13. Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100.00%	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		252	252	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	

1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	64	64	0	100.00%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	7	7	0	100.00%
3 . Penyediaan permakanan	Orang	23	23	0	100.00%
4 . Penyediaan sandang	Orang	7	7	0	100.00%
5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	64	64	0	100.00%
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	7	7	0	100.00%
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	64	64	0	100.00%
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2	2	0	100.00%
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	2	2	0	100.00%
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	0	100.00%
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00%
12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00%
3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		322	322	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	135	135	0	100.00%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	7	7	0	100.00%
3 . Penyediaan permakanan	Orang	135	135	0	100.00%
4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00%
5 . Penyediaan alat bantu	Orang	7	7	0	100.00%
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	3	3	0	100.00%
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15	15	0	100.00%
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	10	10	0	100.00%

	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00%
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		40	40	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	5	5	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	Orang	5	5	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100.00%

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		138	138	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1. Penyediaan permukiman	Orang	23	23	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	40	40	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	34	34	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	40	40	0	100.00%



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

DINAS SOSIAL

**Atas Kinerja Terbaik Dalam Penerapan dan Pelaporan Penyelenggaraan
Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2023**

Dengan Capaian 100%

Manna, 05 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH



SUKARNI, SP.M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690926 199403 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian NO 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos. 38513

Manna, 28 Desember 2023

Nomor : 800/671.a/PE/Dinsos/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permintaan Data**

Kepada Yth,
Seluruh Kabid di Dinas Sosial.
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Nomor: 000.8.6.3/78/B.7/SETDA-BS/2023 Perihal Undangan Rapat penyusunan Laporan Kinerja(LKj Tahun 2023) , sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Kabid yang membidangi untuk dapat menyelesaikan dan mengumpulkan dokumen pendukung penyusunan laporan capaian kinerja (target,realisasi dan dokumentasi) selama 2 tahun terakhir tahun yaitu tahun 2022- 2023. Paling lambat disampaikan tanggal 10 Januari 2024.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan disampaikan data yang dibutuhkan ke sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Atas kerjasamanya diucapkan terimah kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



ZEPIDY GUNAWAN, S.STP.M.Si
NIP. 19820221 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

Nomor : 800 /666/PE/Dinsos/2023
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Manna, 19 Desember 2023
Kepada :
Yth. Seluruh Kabid dan Operator).
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB I) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diminta kepada Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 20 Desember 2023

Pukul : 08.00 s/d selesai

Acara : Rapat Awal Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB I) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Sosial Kab, Bengkulu Selatan

Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kepada seluruh Kabid dan Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diwajibkan hadir pada waktunya. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.


FREDY GUNAWAN, S.STP.MSi
NIP. 19820221 200212 1 001

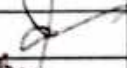
DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

Rabu, 20-12-2023

ACARA / KEGIATAN

Rapat Pembahasan Laporan Kerja Bab 1
Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	Effedy Gusman	kepala Dinas		
2	Junadi	sekrataris		✓
3	Puji Sri Handayani	kalaid Kesos		
4	Benni Juanda	kalaid Penkardatan Bk		
5	Neugs Warti	Kadubag Unsur		
6	Fitri Giunta	kalaid Lijansos		
7	Syahrir	kalaid PM		
8	Dranti Eka Sari	Kadubag Perencanaan		
9	Dia Afrianti	Pegabat Fungsional		
10	Oktini	Kasi Identifikasi data		
11	Winda Hastuti	Akuis keuangan Akui Medu		
12	Enita Afrizani	OP. Dasyas		
13	Febrina	OP. PM		
14	Maryati	OP. UPD LK		
15	Pri. turiani	OP. Lijansos		
16	Rosita Sumardi	OP. Relsos		
17	Hani Saputra	OP. Perencanaan		
18	Reusi Pratiha	PhL		
19	Mia Vanta	PhL		
20				
21				
22				
23				
24				

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si
NIP: 19720121 200212 1 001

MANNA, 20 Desember2023
NOTULEN RAPAT


Drahtu Endri, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Rancangan Awal Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial (Bab I)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

Nomor : 800 /06.a/PE/Dinsos/2024
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Manna, 05 Januari 2024
Kepada :
Yth. Seluruh Kabid dan Operator).
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Rancangan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB II) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diminta kepada Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin , 08 Januari 2024
Pukul : 08.00 s/d selesai
Acara : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB II) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.
Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Sosial Kab, Bengkulu Selatan

Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kepada seluruh Kabid dan Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diwajibkan hadir pada waktunya. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KAB. BENGKULU SELATAN

ERREDY GUNAWAN, S.STP.MSi
NIP.19830221 200212 1 001

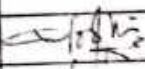
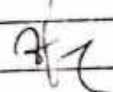
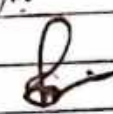
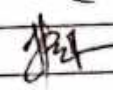
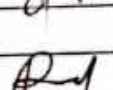
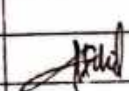
DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

ACARA / KEGIATAN

Senin, 08-01-2024

Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Bab 2
Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	Efreny Dumanan, SST, N.H	Kepak Dinas		
2	Muhammad, S. Sos	Sekretaris Dinas		
3	Puji Sri Handayani	Kabid Resor		
4	Titten, N	Kabid Pelayanan Sosial		
5	FIRM GINATA	KABID Ungamsos		
6	Syahrir	Kabid FM		
7	Dina Arianti	Regisrasi fungsional		
8	Ranti Eko dari	Kabid Perencanaan		
9	Riana Dasti	Kabid umum		
10	OKTINI	Kasi Identifikasi data		
11	Winda Hastuti, SKN, MM	Analisis Keuangan Ahli Muda		
12	Enita Apoliani	OP. Dngasos		
13	Febriana M	OP. FM		
14	Maryanti	Kasubg TU UPD Lbk		
15	Pisri Turiani	OP. Ungamsos		
16	Rosita Sumarta	OP REHSOS		
17	Heru Saputra	Op. Perencanaan		
18	Rendi Pratama	PHL		
19	Mia Vanta	PHL		
20	Tika Umi	PHL		
21	Renaici	PHL		
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

31				
32				
33				
34				
35				

MENGETAHUI :

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BS



EFREDY GUNAWAN, S. STP, M. SI

NIP.19820221 20021/ 1 001

MANNA, 08-01-2024

NOTULIS



Dianti Ekasari, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

• Dokumentasi Rapat Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial (Bab II)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

Nomor : 800 /21.a/PE/Dinsos/2024
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Manna, 16 Januari 2024

Kepada :

Yth. Seluruh Kabid dan Operator).
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Rancangan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB III) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diminta kepada Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 17 Januari 2024

Pukul : 08.00 s/d selesai

Acara : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB III) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Tempat : Ruang Rapat Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kepada seluruh Kabid dan Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diwajibkan hadir pada waktunya. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KAB. BENGKULU SELATAN



ERIK DE GUNAWAN, S.STP.MSI
NIP. 19820221 200212 1 001

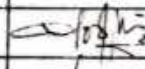
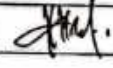
DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

Rabu, 17-01-2024

ACARA / KEGIATAN

Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Bab 3
Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Efreny Durnawan, SSTP. N.H	Kepak Dinas	
2	Juwandi, S.Sos	Sejabat Dinas	
3	Puji Sri Hendayani	Kabid Resor	
4	Titen. N	Kabid Pelayan Sosial	
5	FIRM GINATA	KABID Ungamsos	
6	Syahrar, S.Sos	Kabid FM	
7	Dranti Enderi, SE	Kasubag perencanaan	
8	Ressi Pratana	PHL	
9	Riana Dasti	Kasubag umum	
10	OKTINI	Kasi Identifikasi data	
11	WINDA HASPIRI, SKN, MM	Analisis Keuangan Ahli Muda	
12	Enita Apuliani	OP. Daryasos	
13	Feliana FM	OP. FM	
14	Maryanti	Kasubg TU UPD lok	
15	Pisi Turian	OP. Ungamsos	
16	Rosita Sumarmi	OP REHSOS	
17	Heru Saputra	OP. perencanaan	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

31				
32				
33				
34				
35				

MENGETAHUI

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. BS



EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si

N/P.19820221 200212 1 001

MAHA 17-01-2024

NOTULIS



Dianti Exasari, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

▪ Dokumentasi Rapat Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial (Bab III)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

Nomor : 800 /25/PE/Dinsos/2024

Lampiran : -

Perihal : UNDANGAN

Manna, 23 Januari 2024

Kepada :

Yth. Seluruh Kabid dan Operator).

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Rancangan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB IV) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, maka diminta kepada Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 24 Januari 2024

Pukul : 08.00 s/d selesai

Acara : Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (BAB IV) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023.

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Sosial Kab, Bengkulu Selatan

Mengingat pentingnya rapat tersebut, maka kepada seluruh Kabid dan Operator Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan diwajibkan hadir pada waktunya. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

FREDY GUNAWAN, S.STP.MSi
NIP. 19820221 200212 1 001

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL

Rabu, 24 Januari 2024

ACARA / KEGIATAN

Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Bab IV Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Efedy Gunawan	Kadir Sosial	Wu
2	Juniadi	Selektas	~
3	Pupi S. Haulayari	Kabid Resor	Yudi
4	Titri Ginata	Kabid Linjam Sos	~
5	Syahrir	Kabid PM	So
6	Riana Desh	Kasubag. Umpug	~
7	DIANTI EKASARI	Perencana Ahli Muda	~
8	WINDY HANURI	ANALIS KEB. MASY. & MASY. M	~
9	Maryanti	Kasubag TU	~
10	Mira Vento	PHL	~
11	Putra Nugroho	PHL - B	~
12	Yusuf	Perencanaan Ahli Muda	~
13	Arbani Ismail	Perencanaan Ahli Muda	~
14	Zam Zam	Staf	~
15	Heru Saputra	PHL	~
16	Rosli Sumarm	PHL	~
17	Hurizka K.F	PHL	~
18	Asi Tumari	PHL	~
19	ECE NOPHA Sari	PHL	~
20	Relusi Pratama	PHL	~

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Wu

EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19820221 200212 1 001

MANNA, 24 Januari 2024
NOTULEN RAPAT

~

DIANTI EKASARI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513

Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>

e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

▪ Dokumentasi Rapat Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial (Bab IV)

